

RINGKASAN EKSEKUTIF

Program Demapan merupakan program untuk membantu keluarga miskin dalam menata hidupnya sehingga dapat menjalani hidup layak. Provinsi Papua Barat merupakan salah satu provinsi dengan jumlah penduduk miskin yang masih banyak. Rumah tangga miskin di Provinsi Papua Barat pada hakikatnya disebabkan oleh kurangnya komitmen manusia terhadap norma dan nilai-nilai kebenaran ajaran agama, kejujuran dan keadilan. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya penganiayaan manusia terhadap diri sendiri dan orang lain. Penganiayaan terhadap diri sendiri manusia tercermin dari adanya (a) keengganan bekerja dan berusaha, (b) pendidikan rendah, (c) motivasi rendah, (d) tidak memiliki rencana jangka panjang, (e) budaya kemiskinan dan (f) pemahaman yang keliru terhadap kemiskinan.

Kemiskinan pada dasarnya merupakan ketidakmampuan individu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya (World Bank, 1990). Soedarsono (2000) dalam Safi'i (2011) menyatakan kemiskinan sebagai struktur tingkat hidup yang rendah, mencapai tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibanding dengan standar hidup yang umumnya berlaku dalam masyarakat. Mubyarto (1994) melihat bahwa kemiskinan adalah situasi serba kekurangan yang tidak dapat dihindari si miskin. Sementara Friedman (dalam Safi'i : 2011) mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasi basis kekuasaan sosial yang meliputi modal produktif, network atau jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang-barang, pengetahuan dan ketrampilan yang memadai, dan informasi yang berguna untuk memajukan hidup mereka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa ratio ketergantungan kepala rumah tangga menanggung 1 – 2 orang yang berumur < 15 tahun, 2 – 3 orang berumur 15-55 tahun dan 1 orang berumur > 55 tahun, ini berarti bahwa 1 orang kepala keluarga menanggung minimal 3 – 5 orang berumur produktif (< 55 tahun) dan 1 orang berumur tidak produktif. Dilain pihak rata-rata umur kepala keluarga miskin di Provinsi Papua Barat tergolong umur yang menjelang tidak produktif produktif 46 – 47 tahun, ini berarti tanggung-jawab kepala keluarga untuk menghidupi anggota rumah-tangganya cukup berat. Apalagi sebagian besar kepala keluarga hanya mengadakan pekerjaan usaha budidaya pertanian tanpa ada pekerjaan produktif sebagai alternatif untuk menghidupi seluruh anggota rumah-tangga.

Tingkat pendidikan kepala rumah tangga miskin di provinsi Papua Barat rata-rata hanya lulus tingkat SLTPatau tidak lulus SLTA. Tingkat pendidikan tertinggi yang dicapai oleh kepala rumah tangga merupakan hal sangat vital. Hal ini dikarenakan pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penghasilan (Simanjuntak, 1985) dan kepala rumah tangga merupakan sumber penghasilan utama dalam rumah tangga. Sehingga pendidikan yang telah ditempuh oleh kepala rumah tangga menjadi faktor yang penting dalam menentukan kesejahteraan rumah tangga.

Karakteristik rumah tangga bukan kelompok afinitas di Provinsi Papua Barat pada dasarnya tidak berbeda nyata dengan karakteristik rumah tangga miskin (kelompok afinitas). Rata-rata umur kepala rumah tangga bukan kelompok afinitas kelompok lebih muda dibandingkan kelompok afinitas, tingkat pendidikan bukan kelompok afinitas lebih baik yaitu rata-rata pernah menduduki bangku sekolah tingkat SLTA sampai telah menyelesaikan pendidikan tingkat SLTA. Selain itu jumlah tanggungan kepala rumah tangga bukan kelompok afinitas jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kelompok afinitas

Rendahnya tingkat kepemilikan aset merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kemiskinan. Kepemilikan aset oleh rumah tangga akan mempengaruhi akses pasar yang dapat dilakukan oleh rumah tangga.kepemilikan asset khususnya kepemilikan lahan kelompok afinitas hanya memiliki asset lahan tegalan dan pekarangan, rata-rata kepemilikan lahan tegalan/lahan kering/lahan kebun dan pekarangan di Provinsi Papua Barat masing-masing sebesar 0,18 Ha dan 0,01 Ha. Lahan tegalan/lahan kering/lahan kebun paling besar di kabupaten Manokwari dan Kabupaten Sorong, sedangkan paling kecil di Kota Sorong dan Kabupaten Fakfak. Kepemilikan pekarangan kelompok afinitas hanya ada di kabupaten Sorong rata-rata sebesar 0,01 Ha

Kepemilikan aset lahan pada rumah tangga bukan kelompok afinitas di Provinsi Papua Barat berbeda nyata dengan kepemilikan lahan rumah tangga kelompok afinitas di Provinsi Papua Barat, luas lahan tegalan/lahan kering/kebun rata-rata 0,339 Ha dan 0,075 Ha pada kelompok bukan afinitas serta pada kelompok afinitas luas lahan tegalan/lahan kering/kebun hanya sebesar 0,18 Ha dan lahan pekerangan 0,01 Ha.

Kepemilikan asset ternak pada rumah tangga kelompok afinitas di Provinsi Papua Barat hanya memiliki 3 (tiga) jenis ternak yaitu Sapi, Babi dan Ayam. Rata-rata kepemilikan rumah tangga asset ternak pada kelompok afinitas untuk ternak Sapi sebanyak 2 – 3 ekor, Babi 2 – 3 ekor, dan Ayam 5 – 6 ekor. Kepemilikan asset ternak pada rumah tangga kelompok afinitas di Kota Sorong memiliki jumlah paling banyak dibandingkan

kabupaten lainnya di Provinsi Papua Barat baik jenis ternak Sapi, Babi maupun Ayam, sebaliknya kepemilikan asset ternak paling sedikit di Kabupaten Manokwari dibandingkan di Kabupaten/Kota dilingkungan Provinsi Papua Barat.

Rata-rata kepemilikan asset ternak rumah tangga bukan kelompok afinitas justru lebih rendah dibandingkan kepemilikan asset ternak rumah tangga kelompok afinitas. Kepemilikan ternak sapi, babi dan ayam pada bukan kelompok afinitas di Provinsi Papua Barat masing-masing sebesar 1 ekor Sapi, 1 Ekor Babi dan 4-5 ekor Ayam.

Hampir seluruh keluarga kelompok afinitas telah memiliki televisi, radio/tape recorder dan kulkas masing-masing 1 buah, sedangkan jumlah HP yang dimiliki oleh kelompok afinitas rata-rata sebesar 2 – 3 buah per kepala rumah tangga, demikian juga kepemilikan kasur/tempat tidur yang dimiliki oleh kelompok afinitas rata-rata sebesar 1-2 buah. Namun cukup menggembirakan kelompok afinitas telah memiliki tabungan di bank/rumah rata-rata sebesar Rp. 1.872.036,-.

Nilai tabungan kelompok afinitas paling besar di kabupaten Sorong yaitu rata-rata sebesar Rp. 2.774.256,-, sedangkan paling kecil di Kabupaten Fakfak sebesar Rp. 1.325.000,-

Partisipasi dalam kegiatan kelompok afinitas ditunjukkan oleh jumlah pertemuan rutin/rapat yang dilakukan. Kelompok Afinitas di Provinsi Papua Barat melaksanakan pertemuan/rapat rata-rata 1 – 2 kali dalam sebulannya yaitu dilakukan pada pertengahan minggu ke dua dan pertengahan minggu ke empat setiap bulannya, pertemuan ini lebih sering membicarakan kegiatan usaha yang dialami oleh anggota kelompok afinitas dan menentukan siapa anggota kelompok yang akan diikuti dalam pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah, PNPM, Respek, dan lainnya. Pertemuan ini juga untuk mengambil keputusan kegiatan adat yang dilakukan anggota kelompok afinitas di Provinsi Papua Barat (misalnya penentuan mas kawin, ganti rugi, dsb).

Kegiatan menyimpan/menabung bagi kelompok afinitas yang ada diseluruh desa pada Kabupaten Sorong dan Kabupaten Manokwari merupakan kewajiban karena telah merasa manfaatnya hal ini ditunjukkan rata-rata tabungan kelompok afinitas di Kabupaten Sorong sebesar Rp. 78.242,- per-bulan dan di Kabupaten Manokwari sebesar Rp. 58.000,- per-bulan. Walaupun jumlah tabungan nilainya kecil namun ini merupakan suatu kemajuan bagi kelompok afinitas, ini berarti manfaat mempersiapkan keluarga kelompok afinitas untuk mengatasi hal-hal yang tidak rencanakan maupun telah direncanakan telah diterima oleh anggota kelompok afinitas. Sebaliknya di Kota Sorong dan Kabupaten Fakfak, karena

ketidak-berhasilnya pada tahap pembinaan maka kelompok afinitas di Kota Sorong dan Kabupaten Fakfak merasa tidak ada manfaatnya sehingga anggotanya tidak melakukan menabung.

Rata-rata jumlah pinjaman di Kabupaten Sorong sebesar Rp. 265.749,- dan di Kabupaten Manokwari sebesar Rp. 195.542,- dengan bunga bank untuk Kabupaten Sorong rata-rata 2 % per-bulan dan Kabupaten Manokwari 1,80 % per-bulan. Walaupun Kota Sorong dan Kabupaten Fakfak jarang anggotanya melakukan kredit namun nilai kreditnya jauh lebih besar dibandingkan Kabupaten Sorong dan Kabupaten Manokwari, besarnya nilai pinjaman anggota kelompok afinitas di Kota Sorong rata-rata sebesar Rp. 508.333,- dengan bunga bank rata-rata 0,58 % per-bulan sedangkan di Kabupaten Fakfak rata-rata sebesar Rp. 776.250,- dengan bunga bank rata-rata 0,75 %.

Ketersediaan pangan di Provinsi Papua Barat salah satunya kecamatan yang kurang ketersediaan pangannya terdapat kabupaten sorong tetapi bukan dalam kelompok afinitas, hal ini disebabkan oleh kondisi pola pangan masyarakat yang tergantung pada konsumsi beras, sehingga pemanfaatan lahan untuk pengembangan komoditas lain menjadi terbatas dan banyaknya jumlah penduduk tidak diimbangi dengan produksi pangan merupakan penyebab utama. Transportasi dari provinsi ke kabupaten di Papua Barat dengan menggunakan kapal laut yang singgah dipelabuhan 1 minggu sekali dan dengan pesawat udara, tetapi akses bahan pangan yang diterima masyarakat masih tergolong lancar.

Pangan lokal seperti ubi kayu di produksi di semua kabupaten/kota, meskipun jumlahnya cenderung mengalami penurunan namun kabupaten manokwari masih menjadi produsen terbesar komoditas ubi kayu di provinsi Papua Barat yang menyumbang 22% dari total produksi ubi kayu. Sedangkan untuk komoditas ubi jalar menyumbang 17,34% dari total produksi ubi jalar di provinsi Papua Barat. Pengolahan pangan lokal dilakukan secara tradisional dan belum didukung mesin pengolahan. Komoditas ubi kayu dan ubi jalar bukan menjadi komoditas yang diminati untuk diusahakan, hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya nilai ekonomi komoditas tersebut dan belum terjaminnya kontinuitas hasil.

Kerentanan terhadap kerawanan pangan mengacu pada suatu kondisi yang membuat suatu masyarakat beresiko menjadi rawan pangan. Tingkat kerentanan individu, rumah tangga atau kelompok masyarakat ditentukan oleh tingkat keterpaparan terhadap faktor-faktor resiko dan kemampuan mereka untuk mengatasi situasi tersebut.

Beberapa hasil penelitian di Provinsi Papua Barat mengemukakan satu lingkaran perangkap kemiskinan yang timbul dari hubungan saling mempengaruhi diantara keadaan

masyarakat yang masih terbelakang dan tradisional dengan kekayaan alam melimpah dan belum dikembangkan. Untuk mengembangkan kekayaan alam yang dimiliki, dalam suatu masyarakat harus memiliki tenaga kerja yang mempunyai keahlian untuk memimpin dan melaksanakan berbagai kegiatan ekonomi.

Kondisi rumah tinggal yaitu rata-rata luas lantai kelompok afinitas di Provinsi Papua Barat $\leq 8 \text{ m}^2$, jenis lantainya ubin, jenis dindingnya tembok, fasilitas buang air besar MCK milik sendiri dan sumber penerangannya adalah listrik dari PLN. Rata-rata kondisi rumah tersebut masuk katagori kemiskinan (prasejahtera) menurut BKKBN.

Pola pikir masyarakat dipengaruhi oleh lingkungan di antaranya adalah informasi yang diterima, banyaknya program yang pernah diikuti, dan sumber informasi. Rumah tangga miskin sesungguhnya kurang memahami perihal pentingnya kegiatan kelompok dan aplikasi teknologi, tetapi cukup memahami manfaat tabungan, kepercayaan diri dalam tindakan produktif, manfaat pendidikan, peran gender, tetapi kurang memahami praktek kewirausahaan.

Bantuan Sosial Demapan secara umum dipahami sebagai dana bergulir/penguatan modal usaha kelompok. Rumah tangga miskin juga telah mengerti bahwa untuk pengembangan kehidupan masyarakat yang berkelanjutan tidak menggantungkan hidupnya hanya pada Bansos tetapi lebih kepada bagaimana mengoptimalkan sumberdaya yang ada.

Di tingkat desa pola pikir yang ada bahwa lebih dari 50% masyarakat miskin menyadari manfaat dalam aktivitas kelompok, manfaat dalam aplikasi teknologi, manfaat dan memiliki tabungan di kelompok atau di bank, lebih percaya diri, pentingnya pendidikan keluarga, praktek kewirausahaan, dan 100% keluarga miskin mengerti bahwa Bansos bukan merupakan dana hibang melainkan dana bergulir. Keluarga miskin tingkat desa *belum merasakan* bahwa Demapan secara nyata dapat menjamin pengurangan kerawanan pangan.

Pada semua keluarga miskin di wilayah program Demapan setuju bahwa program UMKM berdampak positif terhadap program Demapan. Program UKM dinilai dapat meningkatkan kapasitas produksi dan ekonomi kelompok afinitas (KA), meningkatkan kapasitas produksi dan pertumbuhan ekonomi desa, mampu mengsinergikan dan mengintegrasikan ekonomi KA dan ekonomi desa, mampu mengsinergikan dan mengintegrasikan ekonomi ekonomi desamdan ekonomi perkotaan, dan memantapkan pencapaian ketahanan pangan.

Terhadap dampak program PNPM pada program Demapan di Provinsi Papua Barat, menunjukkan bahwa semua keluarga miskin menyetujui adanya dampak positif. Dominasi

tanggapan keluarga miskin pada dampak PNPM terhadap Demapan adalah terutama pengaruhnya terhadap peningkatan kapasitas produksi dan ekonomi KA dan terbentuknya sinergi dan integrasi ekonomi KA dan ekonomi desa.

Tanggap keluarga miskin di wilayah Provinsi Papua Barat menunjukkan bahwa Program JPS terpadu berbasis rumah tangga dinilai berpengaruh positif terhadap Program Demapan. Pengaruh positif terutama pada peningkatan kapasitas SDM penduduk miskin, peningkatan akses ekonomi-usaha dan kesempatan kerja, dan peningkatan kinerja ekonomi RT dan kelompok. Hanya sedikit masyarakat yang mempercayai bahwa JPS dapat mempengaruhi Demapan dalam hal meningkatkan kapasitas SDM, meningkatkan kinerja usaha penduduk miskin, dan meningkatkan akses ekonomi penduduk miskin.